



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2016 kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi ini untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 pasal 72 yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Selanjutnya shalawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Besar junjungan kita Muhammad SAW.

Melalui penyampaian ILPPD ini masyarakat dapat mengetahui dan memahami gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi selama tahun anggaran 2016 yang merupakan tahun pertama kepemimpinan kami semenjak dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada tanggal 17 Februari 2016. ILPPD ini merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun ruang lingkup ILPPD mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi dan Tugas Umum Pemerintahan, sebagai komitmen untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yakni "Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya". Secara ringkas disampaikan capaian kinerja tahun 2016 sebagai berikut :

A. Bidang Pariwisata

Sebagai daerah tujuan utama wisata di Sumatera Barat, yang juga merupakan salah satu visi kami, maka secara berkelanjutan kami terus mengupayakan destinasi wisata yang menarik, nyaman, ramah dan bersih bagi pengunjung melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pengambil alihan pengelolaan Parkir oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai upaya untuk menertibkan lokasi dan biaya parkir di Kota Bukittinggi yang selama ini identik dengan biaya yang mahal dan tidak ada kepastian tarif. Untuk pengelolaan parkir, dikukuhkan 74 orang juru parkir yang dilengkapi dengan atribut dan karcis resmi pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
2. Mengambil alih Eks. Bioskop Gloria dan memfungsikannya sebagai gedung parkir bagi kendaraan roda dua dengan daya tampung ± 400 kendaraan, hal ini juga sebagai upaya meningkatkan pendapatan kota.
3. Pemanfaatan Gedung Parkir Kota Bukittinggi yang mampu menampung ± 184 kendaraan roda 4 sebagai upaya mengatasi kemacetan di kawasan Jam gadang.
4. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung terutama wisata kuliner melalui Gerakan Makanan Ramah Harga yakni dengan memasang tarif harga makanan.
5. Peningkatan kebersihan dengan melibatkan segenap stakeholder kota melalui gerakan Jumat Bersih.
6. Penertiban pungutan-pungutan liar di objek-objek wisata dan premanisme.

B. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan terus diupayakan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peningkatan kualitas infrastruktur melalui pembangunan Ruang kelas Baru SMPN 7 dan SMPN 8, SMA /SMK, pembangunan sarana penunjang sekolah seperti pagar sekolah, asrama pelajar SMAN 1 serta melengkapi sarana meubilier sekolah. Salah satu indikator keberhasilan bidang pendidikan yakni Angka Kelulusan pada semua tingkatan pada tahun 2016 yakni 100% dan angka partisipasi murni (APM) untuk semua tingkatan melebihi 100%.

C. Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan terus diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program upaya kesehatan yakni peningkatan pelayanan puskesmas salah satunya melalui akreditasi dan di tahun 2016 dua puskesmas kita telah terakreditasi yakni Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad dan Puskesmas Guguk Panjang, pengawasan obat dan makanan, program jaminan kesehatan masyarakat, program upaya perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas/pustu yakni rehab Puskesmas Plus Mandiangin dan Puskesmas Gulai Bancah. Untuk persiapan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah tahun ini dilaksanakan revisi Studi Kelayakan karena adanya pemindahan lokasi pembangunan yang semula direncanakan di Kelurahan Manggis Ganting dipindahkan ke lokasi yang lebih representatif yakni di Jalan By Pass Bukittinggi kawasan Eks PUSIDO Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

D. Bidang Perdagangan dan Jasa

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat berbagai upaya telah kami lakukan diantaranya :

1. Penertiban pasar simpang aur (Jalan AURI) yang selama ini ditempati untuk berjualan, dan sekarang jalan tersebut telah dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya sebagai upaya mengatasi kemacetan di kawasan Pasar Simpang Aur.
2. Penertiban terminal Simpang Aur dari pedagang yang berjualan di area terminal serta kendaraan yang memanfaatkan terminal sebagai lokasi parkir. Hal ini perlu kita lakukan untuk mengembalikan fungsi terminal sebagaimana mestinya, karena kondisi saat ini terminal Simpang Aur merupakan terminal teraktif se Sumatera.
3. Penertiban pedagang liar di kawasan Pedestrian Jam Gadang, fly over serta tempat-tempat umum lainnya.
4. Untuk menekan angka kemiskinan kota diupayakan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat antara lain yakni melakukan pembinaan dan pengembangan bagi koperasi yang berjumlah 103 unit dan usaha mikro kecil dan menengah berjumlah 9.433 unit melalui pelatihan-pelatihan keterampilan, pelatihan manajemen pengelolaan dan perkuatan modal.

E. Bidang Infrastruktur

1. Perbaikan drainase serta pemeliharaan jalan terus dilaksanakan secara berkala serta pembangunan dan revitalisasi fasilitas umum diantaranya yakni pembangunan posyandu, lapangan olahraga, kantor pemuda dan fasilitas pemerintahan terus diupayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi segenap masyarakat. Dengan panjang jalan kota dalam kondisi baik yakni 154,35 Km. Sedangkan fasilitas pemerintahan yang dibangun diantaranya lanjutan pembangunan kantor Lurah Guguak Bulek dan Kantor Lurah Belakang Balok, rehab Kantor Lurah Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kantor Lurah Pakan Kurai dsb.

2. Penyelesaian permasalahan konsolidasi by pass yang telah lebih dari 20 tahun belum terselesaikan, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran ninik mamak serta stake holder kota yang telah berkerja bersama untuk menuntaskan permasalahan tersebut, serta kepada masyarakat pemilik tanah yang telah bersedia membangun komunikasi bersama kami untuk kemajuan kota ini.

F. Peraturan daerah Yang Ditetapkan

Berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Bukittinggi serta kontribusi berbagai pihak terkait lainnya, maka selama tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak 13 Peraturan daerah yaitu :

- 1) Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 2) Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 3) Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- 4) Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- 5) Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- 6) Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek
- 7) Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 8) Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 9) Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 10) Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan
- 11) Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
- 12) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

13) Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

Masyarakat Kota Bukittinggi yang kami banggakan,

Dalam kesempatan ini pula kami informasikan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
4	PENDAPATAN DAERAH	675,267,277,741.89	647,045,711,855.85	95.82
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73,665,978,704.89	71,303,771,735.85	96.79
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	37,372,320,634.00	30,709,690,231.00	82.17
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	25,008,005,523.89	21,070,502,562.00	84.26
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,733,946,797.00	4,636,543,697.00	124.17
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	7,551,705,750.00	14,887,035,245.85	197.13
4.2.	DANA PERIMBANGAN	571,717,429,850.00	547,829,867,933.00	95.82
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15,942,934,000.00	15,128,297,227.00	94.89
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	458,968,482,000.00	458,968,482,000.00	100.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96,806,013,850.00	73,733,088,706.00	76.17
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29,883,869,187.00	27,912,072,187.00	93.40
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22,914,429,187.00	22,912,072,187.00	99.99
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	1,969,440,000.00	-	-

2. Belanja daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	369,112,321,364.22	349,010,851,917.00	94,55
5.1.1.	Belanja Pegawai	352,495,800,801.22	336,101,758,265.00	95,35
5.1.4.	Belanja Hibah	11,694,321,895.00	11,063,426,045.00	94,61
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2,304,380,000.00	1,333,685,699.00	57,88
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	617,818,668.00	511,981,908.00	82,87
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	371,418,096,231.00	282,162,424,701.00	75,97
5.2.1.	Belanja Pegawai	55,285,208,090.00	49,860,243,789.00	90.19
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	188,585,992,083.00	151,375,611,821.00	80.27
5.2.3.	Belanja Modal	127,546,896,058.00	80,926,569,091.00	63.45
	BELANJA DAERAH	740,530,417,595.22	631,173,276,618.00	85.23

3. Pembiayaan daerah

	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
6.	PEMBIAYAAN	65,263,139,853.33	65,263,139,853.33	100.00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	88,463,139,853.33	88,463,139,853.33	100.00
6.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	88,463,139,853.33	88,463,139,853.33	100.00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23,200,000,000.00	23,200,000,000.00	100.00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	100.00

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2016 ini meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi, yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000.00 dengan realisasi sesuai dengan anggaran atau 100%. Pembentukan Dana Cadangan ini berpedoman pada Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
- Penyertaan Modal (Investasi) pada Bank Nagari Sumatera Barat terealisasi dianggarkan sebesar Rp8.200.000.000.00 dan direalisasikan dengan jumlah yang sama atau 100% .

Masyarakat Kota Bukittinggi yang kami banggakan,

Selanjutnya ijinkan kami untuk menguraikan tentang penyelenggaraan urusan Desentralisasi dan Tugas Umum Pemerintahan

A. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 6 (enam) urusan pilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Setiap urusan pemerintahan dilaksanakan oleh SKPD tertentu sesuai dengan program dan kegiatan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2016. Ada beberapa SKPD juga melaksanakan 2 (dua) urusan atau lebih sesuai dengan tupoksinya. Berikut secara ringkas disajikan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebagai berikut :

1. **Pendidikan** diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diuraikan dalam 12 Program dan 185 kegiatan. Sebagai penunjang kegiatan dalam pelaksanaan urusan Wajib ini dianggarkan dana sebesar Rp. 25.766.208.828 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.345.883.377 atau 78,96%
2. **Kesehatan** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang diuraikan dalam 18 Program dan 115 Kegiatan. Sebagai penunjang kegiatan pada urusan wajib kesehatan dianggarkan dana sebesar Rp. 22.998.591.779 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.627.364.451 atau sebesar 72,30%.
3. **Pekerjaan Umum** dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 97.862.928.099,- dengan realisasi sebesar Rp 63.517.135.128,- atau sebesar 64,90%, dimana anggaran tersebut adalah untuk memfasilitasi 4 program non urusan dengan 24 kegiatan dan 11 program urusan dengan 85 kegiatan.
4. **Perumahan** pada tahun anggaran 2016 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.632.679.250,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.236.218.361,- atau sebesar 90,46%, terdiri dari program non urusan dan program urusan yang dilaksanakan oleh: 1).Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, 2).Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 4).Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang dilaksanakan melalui 10 program dengan 45 kegiatan.
5. **Penataan Ruang** pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.018.782.600,- dengan realisasi sebesar Rp 594.672.033,- atau sebesar 58,37%. Urusan penataan ruang dilaksanakan dalam 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan. Program dan kegiatan pada Urusan Penataan Ruang tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.
6. **Perencanaan pembangunan** dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.106.475.315,- dengan jumlah realisasi sebesar Rp 3.517.298.810,- atau dengan tingkat serapan sebesar 85,65% yang dijabarkan melalui 15 program dan 63 kegiatan.
7. **Perhubungan** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah

di bidang perhubungan. Untuk mendukung urusan perhubungan dialokasikan anggaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 8.611.559.885,- dengan realisasi sebesar Rp 5.585.740.702,- atau sebesar 64,86% untuk menyelenggarakan 9 program dan 45 kegiatan.

8. **Lingkungan Hidup** pada Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 19.432.500.863,- dengan realisasi Rp 17.125.948.840,- atau sebesar 88,13% terdiri dari program belanja non urusan dan belanja urusan sebanyak 14 program dengan 86 kegiatan. Urusan lingkungan hidup ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu: 1). Kantor Lingkungan Hidup dan 2).Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
9. **Pertanahan** dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi melalui 3 program dan 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 660.123.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 104.842.841,- atau sebesar 15,88%.
10. **Kependudukan dan Catatan Sipil** dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.182.434.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.973.718.131,- atau sebesar 90,44% dimana anggaran tersebut adalah untuk memfasilitasi 4 program non urusan dan 1 program urusan yang dilaksanakan melalui 28 kegiatan.
11. **Pemberdayaan Perempuan** dialokasikan anggaran sebesar Rp1.398.756.750,- dengan realisasi sejumlah Rp1.290.011.920,- atau sebesar 92,23%.Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan sepenuhnya oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan 7 program dan 28 kegiatan.
12. **Keluarga Berencana** dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan keluarga berencana melalui 4 program dan 25 kegiatan ini adalah sejumlah Rp 3.803.243.611,- dengan realisasi sebesar Rp 1.945.524.999 atau sekitar 51,15%.
13. **Sosial** dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk mendukung urusan ini Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran dengan total Rp 2.906.657.400,- dan dapat direalisasikan sejumlah Rp2.274.947.368 atau sekitar 78,27 %. Urusan ini dibagi menjadi 9 program dengan 40 kegiatan.

14. **Ketenagakerjaan** dialokasikan anggaran sebesar Rp 584.686.410,- dengan realisasi sebesar Rp 513.044.490,- atau sekitar 87,75 %, melalui 4 program dan 13 kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
15. **Koperasi dan usaha kecil menengah** ditangani oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Total alokasi anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp 1.040.998.330,- dengan realisasi sebesar Rp 1006.737.439 atau jika dipersentasekan mencapai 96,71 % untuk melaksanakan 7 program dan 38 kegiatan.
16. **Penanaman Modal** dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 144.266.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.1954.64,- atau sebesar 53,51%, dimana urusan dilaksanakan melalui 3 program dengan 5 kegiatan.
17. **Kebudayaan** dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. pada tahun 2016 dialokasikan dana melalui belanja langsung yang terdiri dari belanja non urusan dan belanja urusan kebudayaan melalui 7 program dan 31 kegiatan sebesar Rp. 4.088.757.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.629.276.289,- atau sebesar 88,76%.
18. **Kepemudaan dan Olahraga** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.442.305.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.678.018.013,- atau sebesar 92,68% untuk melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan.
19. **Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri** dilaksanakan melalui 75 kegiatan oleh; 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 4) Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, 5) Kecamatan Guguk Panjang dan 6) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Untuk penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini dialokasikan anggaran sebesar Rp12.211.219.962,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.746.017.496,- atau sebesar 79,81%.
20. **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** dialokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan 450 kegiatan pada urusan ini sebesar Rp 83.606.501.217,- dengan realisasi Rp 69.144.716.990 atau sebesar 82,70% terdiri dari program non

urusan dan urusan yang dilaksanakan oleh : 1).Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian, Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan), 2). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , 3). Inspektorat, 4). Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, 5). Badan Kepegawaian Daerah, 6). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM). 7).Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, 8).Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 9). Kecamatan Guguk Panjang.

21. **Ketahanan Pangan** dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.563.059.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.396.709.377,- atau sebesar 89,36%, melalui 6 program dan 34 kegiatan.
22. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 15.227.135.850,- dan realisasi sebesar Rp 13.306.336.267,- atau sekitar 87,39 % untuk menyelenggarakan 27 program dengan 288 kegiatan. Program-program pada urusan ini diselenggarakan oleh 1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan dan Nagari; 2) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan; 3) Kecamatan Guguk Panjang; 4) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh; 5) Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah.
23. **Statistik** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bukittinggi melalui 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.505.850 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.123.300 atau 93,57%
24. **Kearsipan** dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.996.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.076.790,- atau sebesar 95,71% untuk memfasilitasi 2 program dan 7 kegiatan.
25. **Komunikasi dan Informatika** dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yakni; 1).Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2). Sekretariat Daerah (Bagian Humas), 3) Kecamatan Guguk Panjang, 4) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, 5) Kecamatan ABTB. Untuk melaksanakan urusan komunikasi dan informatika yang terdiri dari 6 program dan 28 kegiatan dialokasikan dana sebesar Rp 4.479.392.500 dengan capaian realisasi dana sejumlah Rp3.706.035.343,- atau sebesar 82,74 %.

26. Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan perpustakaan pada Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 654.127.910,- dengan realisasi Rp. 594.031.552,- atau sebesar 90,81% yang dijabarkan melalui 5 program dengan 25 kegiatan.

Masyarakat Kota Bukittinggi yang kami banggakan

Selanjutnya akan kami sampaikan pelaksanaan 6 (enam) Urusan Pilihan, meliputi

- 1. Pertanian** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.494.996.071,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3.997.239.636,- atau 88,93% yang dijabarkan melalui 12 program dengan 52 kegiatan.
- 2. Kehutanan** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 937.805.133,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 32.153.700,- atau sebesar 3,43% untuk memfasilitasi 1 program dan 5 kegiatan.
- 3. Pariwisata** dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.944.365.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.295.604.241,- atau sebesar 86,20%, dimana program urusan pariwisata dimaksud dilaksanakan melalui 3 program dengan 41 kegiatan
- 4. Perikanan** pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi disediakan anggaran sebesar Rp 4.114.139.538,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.276.056.564,- atau sebesar 31,02%, untuk memfasilitasi 4 program dengan 7 kegiatan.
- 5. Perdagangan** dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Adapun total alokasi dana untuk urusan ini adalah Rp 9.159.734.180,- dengan realisasi sejumlah Rp 5.003.773.629,- atau sekitar 54,63 %, yang dilaksanakan melalui 10 Program dengan 43 kegiatan.
- 6. Industri** diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi dana sejumlah Rp 1.254.160.100,- dengan realisasi sebesar Rp 534.970.160,- atau sekitar 42,66 % melalui 4 program dengan 10 kegiatan.

Secara umum capaian kinerja pemerintah Kota Bukittinggi dengan didukung oleh anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD dapat dikatakan telah mencapai target walaupun masih ada beberapa masalah yang dihadapi diantaranya terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum ada juknis pencairannya, permasalahan gagal tender dan pemutusan perjanjian kerja dengan pihak penyedia, keterbatasan lahan terkait dengan tata ruang serta dilakukannya efisiensi anggaran.

B. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

1. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kota Bukittinggi dengan keterbatasan lahan yang kita miliki, maka salah satu upaya yang ditempuh yakni melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain. Adapun pada tahun 2016 kerja sama yang dilaksanakan adalah :
 - a. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Bidang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam bidang teknologi dan informasi melalui penerapan *e-Government* di Kota Bukittinggi melalui sistem dan aplikasi yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk dikelola dan dikembangkan kemudian diterapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bekerjasama
 - c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kota Bukittinggi bidang teknologi informasi khususnya dalam hal sistem pelayanan perijinan dan penanaman modal satu pintu (SIPATU) yang telah diaplikasikan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk kemudian diterapkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi dengan difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
 - d. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Bukittinggi meliputi :
 - Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal. kegiatan meliputi Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan database kemiskinan di Kota Bukittinggi

- Kerjasama dalam hal mitigasi banjir dan bencana, baik melalui sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan kepada aparatur bidang penanggulangan bencana dan masyarakat.
 - Kerjasama dalam rangka penurunan beban pencemaran sungai Batang Agam direalisasikan dalam bentuk kegiatan pemantauan kualitas badan air/sungai Batang Agam
2. Disamping kerjasama dengan pemerintah daerah lain, juga dilaksanakan kerjasama dengan instansi vertikal maupun unsur organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diantaranya :
- a. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - b. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).
 - c. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi
 - d. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Keuangan RI
 - e. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - f. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Komando Distrik Militer 0304/Agam
 - g. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi tentang Penunjukan Kejaksaan Negeri Bukittinggi sebagai Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016.
 - h. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Kepolisian Resor Bukittinggi.
 - i. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi

- j. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan PT. Telekomunikasai Indonesia, tbk tentang Pengembangan *e-Government* Pemerintah Kota Bukittinggi
- k. Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan PT. Bunga Wangsa Sedjati tentang Kerjasama Lembaga Konservasi Jawa Timur Park dengan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Kota Bukittinggi

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dalam rangka mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah melalui forum komunikasi dan adanya interaksi antara penyelenggara pemerintah daerah dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Koordinasi dengan instansi vertikal selama tahun 2016 dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yaitu :

- a. pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah Kota Bukittinggi
- b. pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bukittinggi
- c. Pembentukan Forum Koordinasi Diskusi Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016
- d. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Bukittinggi.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi dalam wilayah administrasi Kota Bukittinggi umumnya adalah berupa kebakaran pada sebagian besar bangunan perumahan masyarakat, tanah longsor, pohon tumbang dan genangan air (banjir setempat) dalam skala kecil.

5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gangguan yang terjadi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi adalah pelanggaran *trantibum* sebanyak 760 kasus. Dimana penyelesaian kasus tersebut melalui Non Yustisial, denda upaya paksa dan Yustisial. Pada tahun ini, untuk melaksanakan dan mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, dibentuk tim gabungan

melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-87-2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi Tahun 2016. Tim ini terdiri dari unsur Pemerintah Kota Bukittinggi, DPRD Kota Bukittinggi, Kodim 0304/Agam, Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan kegiatan meliputi :

- Operasi Penertiban/Penindakan Pekat, Pembongkaran, Penyegehan, Penggusuran, Patroli Wilayah Kota Bukittinggi serta Pengamanan Tamu-Tamu VVIP.
- Kegiatan Razia Gabungan Warung Kelambu yang dilaksanakan dalam bentuk Operasi Penindakan Warung makan yang berjualan pada bulan ramadhan yang tidak sesuai dengan norma adat/ketentuan yang berlaku di Bukittinggi.
- Pengamanan dan Penertiban PKL Kawasan Jam Gadang dalam rangka Menyambut Tahun Baru 2016.
- Operasi Yustisi Penegakan Perda yang dilaksanakan dalam bentuk Penertiban dan Penindakan yang melanggar Perda di Bukittinggi.

Masyarakat Kota Bukittinggi yang kami cintai,

Demikian informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 yang dapat kami sampaikan. Kami bangga pada keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi bersama dengan masyarakat. Hal ini terbukti pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi telah memperoleh 21 penghargaan Tingkat Regional dan Nasional dan 244 penghargaan/prestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat. Untuk tingkat Nasional/regional prestasi/penghargaan yang diraih yakni :

1. Penghargaan Adipura Kirana. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak Provinsi Riau pada tanggal 22 Juli 2016.
2. Juara I Kelurahan Berprestasi Tingkat Regional I Sumatera oleh Kelurahan Kubu Gulai Bancah.
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Pemeriksaan LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2016 oleh BPK RI
4. Penghargaan Dari Menteri Keuangan terhadap keberhasilan Kota Bukittinggi meraih opini WPT selama 3 tahun berturut-turut.

5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016 Kategori Utama. Penghargaan ini diraih karena Pemerintah Kota Bukittinggi dinilai berhasil membangun bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerahnya.
6. Piala Wahana Tata Nugraha 2016 jenis kategori tertib angkutan dan berlalu lintas yang diserahkan Menteri Perhubungan RI dengan disaksikan Wakil Presiden H. Muhammad Jusuf Kalla
7. Adi Karya Pangan Nusantara Kategori Pelaku Ketahanan Pangan Kelompok Industri Pangan Olahan yang diraih oleh UP3AP Pelangi Bukit Apit Puhun
8. Penghargaan Kawasatara Pawitra merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang peduli, berintegritas dan memiliki kinerja dalam program persiapan calon kepala sekolah. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
9. Koperasi Berprestasi/Koperasi Award yang diraih oleh KPRI Dr. Achmad Mochtar
10. Juara I Lomba Keterampilan Siswa SMK Bidang Secretary yang diraih oleh Sintia Armaiyani
11. Juara I Lomba Keterampilan Siswa SMK Bidang Marketing yang diraih oleh Suci Permata Sari
12. Juara II Tari Kreasi pada FLS2N Tingkat. SD yang diraih oleh Team Tari SDS Al Azhar
13. Juara II Tari Berpasangan pada FLS2N Tk. SLTA yang diraih oleh Dia Yunifa, Difa Oktavia (SMAN 4)
14. Juara II Bidang Sekretaris pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Berprestasi yang diraih oleh Asnim, S.Pt, MM
15. Juara III Bidang TIK pd LKP Berprestasi yang diraih oleh Warniyati, SE (LKP Widyaloka)
16. Juara I Budaya Mutu Sekolah Tingkat SD yang diperoleh SDN 02 Percontohan
17. Juara III Bulu Tangkis, PAPERNAS yang diperoleh Deby
18. Nominasi Tingkat Nasional Lomba Pengelola Kelompok BKR oleh Muniarti (Kelurahan Tarok Dipo)
19. Puskesmas Terakreditasi Utama yang diperoleh Puskesmas Guguk Panjang
20. Puskesmas Terakreditasi Madya yang diraih oleh Puskesmas Rasimah Ahmad
21. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional yakni penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang diraih oleh SDN 04 Garegeh, SDN 08 Kubu Tanjung, SDN 12 Bukit Cangang, MAN 1 Bukittinggi.

Kami yakin semua yang sudah dicapai Kota Bukittinggi selama ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang harus disyukuri bersama sebagai anugrah yang diberikan Allah SWT. Ke depan tantangan yang dihadapi akan semakin berat, mari bersama kita bergandengan tangan, pererat rasa persaudaraan untuk membangun kota yang kita cintai ini.

Akhir kata kepada segenap masyarakat Kota Bukittinggi yang telah membaca dan memperhatikan dengan seksama Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan kami atas nama pemerintah Kota Bukittinggi menyadari bahwa masih ada kinerja pemerintahan yang belum menunjukkan hasil yang optimal, hal ini merupakan tugas kami Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2016-2021 bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkannya bagi kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi yang kami banggakan. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi atas penyampaian kritik, saran dan pemikiran yang diberikan oleh seluruh warga masyarakat Kota Bukittinggi langsung ataupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sekian, Terima kasih

Billahi Taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH